BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 421.21/ K. sp. 748-Disdik/2022
LAMPIRAN : 1 (Satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, penggabungan satuan pendidikan merupakan peleburan atau penyatuan dua atau lebih satuan pendidikan yang jenis dan jenjangnya sama menjadi satu satuan pendidikan;

b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dua atau lebih satuan pendidikan perlu digabung dengan memperhatikan kriteria penggabungan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 122 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggabungan Sekolah Dasar Negeri

di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan usulan penggabungan secara tertulis kepada Bupati untuk ditetapkan melalui Keputusan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E);

14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 5);

15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 122 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 122).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Dengan adanya penetapan penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Cirebon, maka hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan siswa, pengangkatan Kepala Sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya serta aset sekolah akan diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Bupati ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 des ember 2022
BUPATI CIREBON,

IMRON

Tembusan :
Inspektur Kabupaten Cirebon

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 421.21/Kep.748-Dis dik /2022
TANGGAL : 30 desember 2022
TENTANG : PENETAPAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN CIREBON

NO	SDN YANG DIGABUNG	KECAMATAN	SDN SETELAH PENGGABUNGAN
1	SD NEGERI 1 GEYONGAN SD NEGERI 2 GEYONGAN	Arjawinangun	SD NEGERI 1 GEYONGAN
2	SD NEGERI 1 ARJAWINANGUN SD NEGERI 4 ARJAWINANGUN	Arjawinangun	SD NEGERI 1 ARJAWINANGUN
3	SD NEGERI 1 MERTAPADA WETAN SD NEGERI 2 MERTAPADA WETAN	Astanajapura	SD NEGERI 1 MERTAPADA WETAN
4	SD NEGERI 1 CANGKUANG SD NEGERI 2 CANGKUANG	Babakan	SD NEGERI 1 CANGKUANG
5	SD NEGERI 1 GEMBONGAN MEKAR SD NEGERI 2 GEMBONGAN MEKAR	Babakan	SD NEGERI 1 GEMBONGANMEKAR
6	SD NEGERI 1 BABAKAN SD NEGERI 2 BABAKAN	Babakan	SD NEGERI 1 BABAKAN
7	SD NEGERI 2 CIAWIGAJAH SD NEGERI 3 CIAWIGAJAH	Beber	SD NEGERI 2 CIAWIGAJAH
8	SD NEGERI 1 JATISEENG KIDUL SD NEGERI 2 JATISEENG KIDUL	Ciledug	SD NEGERI 1 JATISEENG KIDUL

NO	SDN YANG DIGABUNG	KECAMATAN	SDN SETELAH PENGGABUNGAN
	SD NEGERI 3 JATISEENGKIDUL		
9	SD NEGERI 1 BUDUR SD NEGERI 2 BUDUR	Ciwaringin	SD NEGERI 1 BUDUR
10	SD NEGERI 1 CIWARINGIN SD NEGERI 3 CIWARINGIN	Ciwaringin	SD NEGERI 1 CIWARINGIN
11	SD NEGERI 1 CIKEDUK SD NEGERI 2 CIKEDUK	Depok	SD NEGERI 1 CIKEDUK
12	SD NEGERI 1 WARUKAWUNG SD NEGERI 2 WARUKAWUNG SD NEGERI 3 WARUKAWUNG	Depok	SD NEGERI 1 WARUKAWUNG
13	SD NEGERI 1 KALIPASUNG SD NEGERI 2 KALIPASUNG	Gebang	SD NEGERI 1 KALIPASUNG
14	SD NEGERI 1 KALIMARO SD NEGERI 2 KALIMARO	Gebang	SD NEGERI 1 KALIMARO
15	SD NEGERI 1 GEBANG SD NEGERI 2 GEBANG	Gebang	SD NEGERI 1 GEBANG
16	SD NEGERI 1 PANUNGGUL SD NEGERI 2 PANUNGGUL	Gegesik	SD NEGERI 1 PANUNGGUL
17	SD NEGERI 2 JAGAPURA LOR SD NEGERI 3 JAGAPURA LOR	Gegesik	SD NEGERI 2 JAGAPURA LOR

NO	SDN YANG DIGABUNG	KECAMATAN	SDN SETELAH PENGGABUNGAN
18	SD NEGERI 2 PALIMANAN BARAT SD NEGERI 3 PALIMANAN BARAT	Gempol	SD NEGERI 2 PALIMANAN BARAT
19	SD NEGERI 1 KEMPEK SD NEGERI 2 KEMPEK	Gempol	SD NEGERI 1 KEMPEK
20	SD NEGERI 1 ASTANA SD NEGERI 2 ASTANA	Gunung Jati	SD NEGERI 1 ASTANA
21	SD NEGERI 1 GROGOL SD NEGERI 2 GROGOL	Gunung Jati	SD NEGERI 1 GROGOL
22	SD NEGERI 2 BOJONG WETAN SD NEGERI 3 BOJONG WETAN	Jamblang	SD NEGERI 2 BOJONG WETAN
23	SD NEGERI 1 PRAJAWINANGUN WETAN SD NEGERI 2 PRAJAWINANGUN WETAN	Kaliwedi	SD NEGERI 1 PRAJAWINANGUN WETAN
24	SD NEGERI 1 PEGAGAN KIDUL SD NEGERI 2 PEGAGAN KIDUL	Kapetakan	SD NEGERI 1 PEGAGAN KIDUL
25	SD NEGERI 2 KARANGTENGAH SD NEGERI 3 KARANGTENGAH	Karang Sembung	SD NEGERI 2 KARANGTENGAH
26	SD NEGERI 1 TUK SD NEGERI 2 TUK	Kedawung	SD NEGERI 1 TUK
27	SD NEGERI 2 KLANGENAN SD NEGERI 3 KLANGENAN	Klangenan	SD NEGERI 2 KLANGENAN

NO	SDN YANG DIGABUNG	KECAMATAN	SDN SETELAH PENGGABUNGAN
28	SD NEGERI 1 JEMARAS LOR SD NEGERI 2 JEMARAS LOR	Klangenan	SD NEGERI 1 JEMARAS LOR
29	SD NEGERI 1 KLANGENAN SD NEGERI 4 KLANGENAN	Klangenan	SD NEGERI 1 KLANGENAN
30	SD NEGERI 1 SLANGIT SD NEGERI 2 SLANGIT	Klangenan	SD NEGERI 1 SLANGIT
31	SD NEGERI 1 KALIRAHAYU SD NEGERI 2 KALIRAHAYU	Losari	SD NEGERI 1 KALIRAHAYU
32	SD NEGERI 1 BANJARWANGUNAN SD NEGERI 2 BANJARWANGUNAN	Mundu	SD NEGERI 1 BANJARWANGUNAN
33	SD NEGERI 1 PASURUAN SD NEGERI 2 PASURUAN	Pabedilan	SD NEGERI 1 PASURUAN
34	SD NEGERI 1 CILUKRAK SD NEGERI 2 CILUKRAK	Palimanan	SD NEGERI 1 CILUKRAK
35	SD NEGERI 1 PANONGAN SD NEGERI 2 PANONGAN	Palimanan	SD NEGERI 1 PANONGAN
36	SD NEGERI 1 PANGURAGAN KULON SD NEGERI 2 PANGURAGAN KULON	Panguragan	SD NEGERI 1 PANGURAGAN KULON
37	SD NEGERI 1 KARANGANYAR SD NEGERI 2 KARANGANYAR	Panguragan	SD NEGERI 1 KARANGANYAR

NO	SDN YANG DIGABUNG	KECAMATAN	SDN SETELAH PENGGABUNGAN
38	SD NEGERI 1 CIGOBANGWANGI SD NEGERI 2 CIGOBANGWANGI	Pasaleman	SD NEGERI 1 CIGOBANGWANGI
39	SD NEGERI 1 GAMEL SD NEGERI 2 GAMEL	Plered	SD NEGERI 1 GAMEL
40	SD NEGERI 1 TRUSMI WETAN SD NEGERI 2 TRUSMI WETAN SD NEGERI 3 TRUSMI WETAN	Plered	SD NEGERI 1 TRUSMI WETAN
41	SD NEGERI 1 KARANG MULYA SD NEGERI 2 KARANGMULYA	Plumbon	SD NEGERI 1 KARANG MULYA
42	SD NEGERI 1 BODELOR SD NEGERI 2 BODELOR	Plumbon	SD NEGERI 1 BODELOR
43	SD NEGERI 1 GOMBANG SD NEGERI 2 GOMBANG	Plumbon	SD NEGERI 1 GOMBANG
44	SD NEGERI 1 SIDAWANGI SD NEGERI 2 SIDAWANGI	Sumber	SD NEGERI 1 SIDAWANGI
45	SD NEGERI 1 BOJONGKULON SD NEGERI 2 BOJONGKULON	Susukan	SD NEGERI 1 BOJONGKULON
46	SD NEGERI 1 SUSUKAN SD NEGERI 2 SUSUKAN	Susukan	SD NEGERI 1 SUSUKAN

NO	SDN YANG DIGABUNG	KECAMATAN	SDN SETELAH PENGGABUNGAN
47	SD NEGERI 1 CURUGWETAN SD NEGERI 2 CURUGWETAN	Susukan Lebak	SD NEGERI 1 CURUGWETAN
48	SD NEGERI 1 SUSUKANAGUNG SD NEGERI 2 SUSUKANAGUNG	Susukan Lebak	SD NEGERI 1 SUSUKANAGUNG
49	SD NEGERI 1 DAWUAN SD NEGERI 2 DAWUAN	Tengah Tani	SD NEGERI 1 DAWUAN
50	SD NEGERI 1 KARANGSARI SD NEGERI 2 KARANGSARI	Waled	SD NEGERI 1 KARANGSARI
51	SD NEGERI 1 CIKULAK SD NEGERI 2 CIKULAK	Waled	SD NEGERI 1 CIKULAK

BUPATI CIREBON,

IMRON